

## ABSTRAK

### **Caty Aulia Putri : KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PDIP DPC KABUPATEN PURWAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

Keterwakilan perempuan dalam partai politik salah satunya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik berbunyi : “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (Tiga Puluh Perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”. Kenyataannya DPC PDIP Kabupaten Purwakarta belum memenuhi ketentuan tersebut karena keterwakilan perempuan dalam kepengurusan mencapai mencapai 27,5% (Dua Puluh Tujuh koma Lima Perseratus).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana implementasi keterwakilan perempuan dalam Partai PDIP DPC Kabupaten Purwakarta, bagaimana kendala-kendala hukum yang dihadapi, dan bagaimana upaya-upaya hukum yang diterapkan oleh Partai PDIP DPC Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan. Pembahasan ini dihubungkan dengan Pasal 20 Undag-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Penelitian ini menjadikan Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlindungan akan perlakuan diskriminatif sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan keterwakilan perempuan. Peneliti menggunakan teori keadilan Aristoteles dan teori Hak Asasi Manusia. Teori Hukum Feminis digunakan oleh peneliti dengan fokus bagaimana hukum menjadi alat untuk menghilangkan diskriminasi perempuan. Kebijakan affirmative merupakan implementasi dari hukum sebagai media pemenuhan hak perempuan dalam ruang politik, salah satunya dalam Pasal 20 Undang-Undang Partai Politik.

Permasalahan yang telah dirumuskan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka, studi lapangan/observasi, serta melakukan wawancara kepada pihak terkait.

Keterwakilan perempuan dalam Partai Politik PDIP DPC Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentag Partai Politik dapat disimpulkan belum terpenuhi karena keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tersebut hanya mencapai 27,5% (Dua Puluh Tujuh koma Lima Perseratus). Kendala dalam pembahasan ini adalah pandangan masyarakat terhadap politik dan perempuan, pendidikan politik, dan rekrutmen serta pendistribusian partai. Partai PDIP DPC Kabupaten Purwakarta berupaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dengan melibatkan perempuan dalam wilayah krusial partai politik, membagi kepengurusan sampai tingkatan terbawah agar memperluas jangkauan partai politik serta untuk memaksimalkan pendidikan politik yang merata kepada anggota partai dan masyarakat.

**Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Partai Politik**

## ABSTRACT

Women's representation in political parties is regulated in Article 20 of Law Number 2 of 2008 with amendments to Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, which reads: "The management of Political Parties at the provincial and district / city levels as referred to in Article 19 paragraph (2) and paragraph (3) is compiled by taking into account women's representation of at least 30% (Thirty Percent) which is regulated in the AD and ART of each Political Party". In fact, the DPC PDIP Purwakarta Regency has not fulfilled these provisions because women's representation in the management reached 27.5% (Twenty Seven point Five Percent).

This research aims to discuss how the implementation of women's representation in the Purwakarta Regency DPC PDIP Party, how the legal obstacles faced, and how the legal efforts applied by the Purwakarta Regency DPC PDIP Party in the implementation of women's representation. This discussion is related to Article 20 of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties.

This research makes Article 28 I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning the protection of discriminatory treatment as the basis of reference in the implementation of women's representation. The researcher uses Aristotle's theory of justice and human rights theory. Feminist Legal Theory is used by researchers with a focus on how law becomes a tool to eliminate discrimination against women. Affirmative policy is the implementation of law as a medium for fulfilling women's rights in the political sphere, one of which is in Article 20 of the Political Party Law.

The problems that have been formulated are solved using descriptive research methods using a juridical-empirical approach. The data collection is done by literature review, field study/observation, and conducting interviews with related parties.

The representation of women in the PDIP DPC Political Party of Purwakarta Regency in relation to Article 20 of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties can be concluded that it has not been fulfilled because the representation of women in the management only reaches 27.5% (Twenty Seven point Five Percent). The obstacles in this discussion are people's views on politics and women, political education, and party recruitment and distribution. The PDIP DPC Purwakarta Regency seeks to increase women's representation by involving women in crucial areas of political parties, dividing the management to the lowest level in order to expand the reach of political parties and to maximize political education that is evenly distributed to party members and the community.

**Keyword : *Women's Representation, Political Parties***